

PERWAL NO.3 , BD 2022/NO.3 , 31 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
2022

ABSTRAK : pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai harus didasarkan pada hasil analisa jabatan dan evaluasi jabatan yang berupa nilai jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. Berdasarkan hasil analisa jabatan dan evaluasi jabatan, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP

BAB III PENETAPAN, PENGHITUNGAN DAN KRITERIA

PEMBERIAN TPP
BAB IV TPP
BAB V TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
BAB VI TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA
BAB VII TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAB VIII TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
BAB IX TPP BAGI PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN SISTEM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BAB X TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BAB XI PEMBERIAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGURANGAN TPP PEGAWAI
BAB XII PENILAIAN TPP PEGAWAI
BAB XIII PEMBAYARAN TPP PEGAWAI
BAB XIV PENGUKURAN SKP
BAB XV MEKANISME PEMBAYARAN TPP
BAB XVI PEMBIAYAAN
BAB XVII MONITORING DAN EVALUASI
BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

- Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman tentang pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 4 halaman
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2022.